

## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

# KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 740/V/TAHUN 2025 TENTANG

# PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

#### Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu mengangkat pejabat pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



#### Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327):
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);

# Memperhatikan

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 857/1511.e/SJ, Perihal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting, tanggal 28 Mei 2025;
- 2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 800.1.11.1/45/V/PLT, tanggal 27 Mei 2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengangkat pejabat pengelola keuangan daerah Provinsi

Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Nama : DR. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si

NIP : 198203062000121001

Pangkat/Gol.Ruang: Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Badan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan

KEDUA : Pejabat pengelola keuangan daerah Provinsi Sulawesi

Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran



#### Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Belanja Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

KETIGA : Contoh spesimen tanda tangan dan paraf pejabat pengelola

keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa jabatan pejabat pengelola keuangan daerah Provinsi

Sulawesi Selatan mengikuti masa jabatannya selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei dan

memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Mei 2025

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

£

# FATMAWATI RUSDI

## Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan III;
- 5. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6. Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7. Yang bersangkutan.



#### Catatan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 740/V/TAHUN 2025 **TENTANG** PENGANGKATAN PEJABAT **PENGELOLA** KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

# CONTOH SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Tandatangan	Paraf
1.	DR. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si NIP. 198203062000121001 Pembina Utama Muda, IV/c	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	fergusse	4

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

§

FATMAWATI RUSDI



- Catatan :
  UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
  UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code